

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pesatnya proses modernisasi dan globalisasi telah membawa kemajuan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) sehingga memberikan perubahan pada tatanan hidup dunia termasuk bangsa Indonesia.

Perkembangan tersebut mengubah paradigma pembangunan bangsa termasuk dalam bidang pendidikan, dimana pembangunan diarahkan untuk memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Sehingga keberadaan pendidikan tinggi yang bermutu menjadi faktor utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pendidikan tinggi diharapkan mampu melakukan pembenahan dan perubahan agar mampu menampilkan performa pelayanan publik prima terutama pelayanan dalam bidang pendidikan. Dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan mampu membawa keberhasilan dalam pembangunan secara lokal maupun nasional terutama pembangunan yang bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beradab, berilmu dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari perguruan tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus melakukan pengembangan pendidikan dan teknologi untuk peningkatan mutu pelayanan publik yang diaplikasikan melalui pengembangan sumber daya dalam penyelenggaraan tri dharma Perguruan Tinggi. Ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya pendukung lainnya yang memadai diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan. Dengan tata kelola yang demokratis dengan mengutamakan nilai-nilai tata kelola yang baik

yakni: transparan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, maka keberadaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan memiliki reputasi dan citra yang baik di mata publik dan berdaya saing untuk mewujudkan tujuan pembangunan bangsa.

Secara umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado harus terus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, mulai dari tata kelola manajemen akademik, penguatan dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia agar makin profesional dengan dukungan ketersediaan sumber daya pendukung akademik yang memadai, meningkatkan pelayanan publik, serta perlu melakukan berbagai inovasi sehingga diharapkan mampu menghasilkan kualitas lulusan yang kreatif, inovatif dan berdaya saing yang bermuara pada tercapainya visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses dan upaya pengembangan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas lewat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang direalisasikan melalui program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado merancang rencana strategis tahun 2020-2024, dengan memperhatikan renstra Kemendikbud, Renstra Universitas Pembangunan Indonesia Manado serta merekomendasi renstra prodi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan dijabarkan kedalam bentuk program-program kegiatan/kerja yang sangat diharapkan dapat direalisasikan dengan berorientasi pada implementasi prinsip-prinsip *Good Governance University*.

1.2. Kondisi Saat ini

1.2.1. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lahir dari kesadaran bahwa dinamika sosial politik dan pemerintahan di tingkat lokal khususnya Sulawesi Utara membutuhkan pusat pendidikan tinggi di bidang ilmu sosial politik dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Politik hanya dimiliki oleh satu PTN yakni Universitas Sam Ratulangi Manado, sehingga Universitas Pembangunan Indonesia Manado mempergunakan peluang tersebut untuk mendirikan FISIP dengan program studi Ilmu Politik di lingkup PTS di Sulawesi Utara sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan ilmu politik.

Selain pertimbangan secara umum tersebut, berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki urgensi lain juga yang menjadi pertimbangan, yakni : *pertama*, Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah perbatasan dengan potensi bisa menjadi salah satu pusat pariwisata di kawasan timur Indonesia; *kedua*, Sulawesi Utara adalah daerah dengan keragaman kehidupan sosial kemasyarakatan; *ketiga*, Sulawesi Utara masih memerlukan banyak sumber daya manusia yang menguasai bidang sosial politik serta pemerintahan yang demokratis dalam tatanan masyarakat multikultural yang sudah ada.

Secara legal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado secara formal terdaftar sejak tahun 2000 dengan izin resmi pemerintah lewat Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 02 Oktober 2000 Nomor 205/1/10/2000 yang menaungi 6 (enam) Fakultas dan 8 (delapan) Program Studi yaitu: Fakultas

Keperawatan dengan 2 (dua) program studi, Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Teknik dengan 2 (dua) program studi, Program Studi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, dan Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Inggris.

Diawal pendiriannya, UNPI Manado menjadikan bidang sosial politik sebagai salah satu fokus utama untuk menjawab kebutuhan daerah terhadap kebutuhan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, publik maupun organisasi kemasyarakatan. Sejak awal berdirinya sampai tahun 2020 ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hanya program studi ilmu politik saja.

Kampus UNPI Manado berkedudukan di Jalan Wolter Mongisidi VI No. 129 Bahu Lingkungan II Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas lahan 505 m² memiliki 1 (satu) gedung perkuliahan yang terdiri dari 6 (enam) lantai yang dipergunakan untuk seluruh proses perkuliahan. Fakultas ini masih berkomitmen untuk turut serta dalam melahirkan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

1.2.2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan Penjaminan Mutu

a. Tata Pamong

Dalam menjamin kelancaran seluruh proses pelayanan akademik di tingkat Fakultas, maka sistem tata pamong Fakultas dilaksanakan dengan berpijak pada pedoman penyelenggaraan sistem tata pamong yang ada pada Statuta Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Renstra Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado,

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado.

Upaya mewujudkan visi misi, yang kemudian dijabarkan lebih rinci kedalam program kerja dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan memenuhi 5 (lima) pilar unsur *good university governance*, yakni kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kredibel

Dalam pelaksanaan pembagian tugas yang dibentuk dalam struktur organisasi atau tata pamong tingkat fakultas, secara kredibel mengacu pada Statuta Universitas Pembangunan Indonesia Manado tahun 2019. Berdasarkan landasan dokumen tersebut, secara prosedural tata pamong diatur dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan semua keputusan melalui penyelenggaraan setiap rapat Senat Fakultas, rapat pimpinan di tingkat Fakultas serta rapat ditingkat program studi. Semua keputusan yang disepakati bersama tersebut menjadi dasar mengatur tatanan setiap unit kerja dilingkungan FISIP UNPI Manado. Perwujudannya dapat dilihat dalam pemilihan Senat Fakultas Ilmu Sosial Politik dilakukan Pemilihan Dekan yang dilakukan secara terbuka, berintegritas dan demokratis melalui pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup UNPI Manado, dimana prosesnya dimulai dengan melakukan penjangkaran aspirasi dari seluruh sivitas akademika dilingkungan FISIP UNPI Manado. Legitimasi kepemimpinan Dekan serta Senat Fakultas disahkan dengan SK Rektor.

Sementara itu, penentuan ketua program studi ilmu politik masih dilakukan penunjukan oleh Dekan berdasarkan

beberapa pertimbangan secara akademik yaitu merupakan dosen tetap program studi ilmu politik, minimal pendidikan Magister (S2) di bidang ilmu politik dan/atau bidang ilmu yang serumpun, berpangkat akademik minimal Asisten Ahli. Syarat integritas dan etik yaitu memiliki rekam jejak integritas akademik yang baik, bebas dari pelanggaran dan sanksi akademik, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan program studi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan universitas serta memiliki pengalaman dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi. Legitimasi penunjukan Ketua Program Studi Ilmu Politik disahkan lewat SK Dekan dan dilaporkan kepada Rektor untuk memperoleh pengesahan di tingkat universitas. Akan tetapi walaupun prosesnya ditunjuk oleh Dekan, tetap perlu transparansi dan sosialisasi sehingga didukung oleh seluruh dosen program studi yang ada.

Secara khusus dalam tahun 2020 oleh karena terjadi pengunduran diri dari Dekan yang sementara menjabat waktu, maka pergantian Dekan FISIP UNPI Manado dilakukan penunjukan langsung oleh Rektor kepada Ketua Program Studi Ilmu Politik menjadi Pelaksana tugas (Plt) Dekan yang disahkan dengan SK Rektor. Masa jabatan Plt Dekan ditetapkan sampai tahun 2024 yakni sampai dilaksanakannya pemilihan Dekan definitif.

2. Transparan

Tata kelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang dijalankan bersifat transparan, dalam arti bahwa setiap kebijakan atau informasi yang ada di Fakultas dapat diketahui secara jelas oleh seluruh unsur sivitas akademika.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Pimpinan Fakultas berupaya untuk terus menciptakan sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses sehingga seluruh data dan informasi baik akademik, kemahasiswaan, dan administrasi lainnya diketahui dengan jelas melalui rapat Pimpinan dan Senat. Dalam aspek pengelolaan anggaran, FISIP UNPI Manado menyusun program kerja serta alokasi anggarannya dalam rapat Pimpinan baik di tingkat Program Studi dan rapat Fakultas. Fakultas dan Program Studi mendapatkan anggaran proporsional berdasarkan setiap tahunnya berdasarkan keberadaan jumlah mahasiswa. Semua program kerja yang disepakati dalam rapat pimpinan, diimplementasikan oleh fakultas dan program studi. Kinerja fakultas dan program studi bersama dengan penyerapan anggaran dimonitor secara rutin dan dilakukan evaluasi setiap tahun. Kemudian seluruh hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh menjadi dasar penyusunan laporan.

Berkaitan dengan tata pamong yakni proses pemilihan pimpinan fakultas (Dekan), mengikuti beberapa tahapan, yaitu: 1. Sosialisasi informasi terkait pemilihan Dekan serta persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon; 2. Pendaftaran Bakal Calon; 3. Penetapan Calon; 4. Pemaparan Calon; 5. Penjaringan Calon; 6. Pengusulan Calon, sebanyak 2 orang ke tingkat Universitas oleh Senat FISIP UNPI Manado. Dalam mekanisme tersebut, semua dosen memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan namun diharapkan agar memenuhi kualifikasi serta syarat administrasi lainnya sesuai kaidah organisasi dan tata kerja UNPI Manado. Melalui pola informasi tersebut yang ditetapkan dalam prosedur tersebut sebagai upaya mewujudkan prinsip kredibilitas, integritas dan akuntabilitas calon sehingga dapat dinilai

oleh sivitas akademika FISIP UNPI Manado melalui paparan visi, misi, tujuan dan rencana program/kebijakan yang diusung dan akan dilakukan jika terpilih. Selanjutnya proses penjaringan calon sesuai dengan hasil pemilihan yang dilakukan dengan mekanisme satu orang satu suara (*oneman one vote*) yang diikuti oleh sivitas akademika di FISIP UNPI Manado

Tahap selanjutnya adalah penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dilakukan dalam rapat Senat Fakultas untuk diusulkan sesuai dengan hasil penjaringan yang diperoleh oleh calon. Keputusan Senat Fakultas serta aturan pemilihan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Proses ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan suatu sistem yang akuntabel, sehingga sistem tersebut akan menjadi bagian dari proses penjaminan mutu ditingkat Fakultas.

3. Akuntabel

Prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban setiap unsure pimpinan dan jajaran dibawahnya untuk mempertanggung jawabkan kinerja serta penggunaan sumber daya secara transparan, jujur dan tepat sasaran.

Dalam implementasinya, akuntabel pengelolaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado nampak dalam bentuk komitmen tentang kesediaan serta kesiapan untuk dapat dilakukan audit secara berkala secara administrasi maupun akademis. Audit Internal Mutu telah dilakukan oleh unsur Penjaminan Mutu Internal Universitas.

4. Bertanggungjawab

Dalam sistem pengelolaan FISIP UNPI Manado diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip bertanggungjawab yang dibuktikan dengan sikap pimpinan, fakultas dan prodi, dosen,

tenaga kependidikan serta mahasiswa yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan kode etik universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip bertanggungjawab di FISIP UNPI Manado dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Kepemimpinan Tata Regulasi

Seluruh unsur pimpinan baik Dekan, Ketua Program Studi serta Senat FISIP menjalankan kewenangan sesuai Statuta UNPI Manado, dan semua kebijakan fakultas selaras dengan visi, misi dan tujuan universitas.

b). Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Seluruh dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan profesional dengan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai dasar pelaksanaan pengajaran setiap semester, melaksanakan penelitian secara mandiri maupun berkolaborasi dengan sesama dosen dan/atau mahasiswa bimbingan studi akhir yang luarannya berupa publikasi yang mudah diakses publik melalui e-journal Lyceum yang tersedia di website Universitas Pembangunan Indonesia Manado <https://unpi.ac.id> serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) setiap semester dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang sosial, politik atau pemerintahan. Meskipun luarannya belum berupa publikasi, tetapi dapat dilacak melalui ketersediaan laporan kegiatan yang disusun oleh para dosen sesudah melaksanakan PKM. Selain itu juga bentuk pertanggungjawaban kinerja dosen juga dapat dilacak lewat

pengisian Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang rutin dilakukan setiap semester yang diverifikasi berjenjang.

c). Pengelolaan Administrasi dan Sumber Daya

Pengelolaan administrasi maupun akademik diselenggarakan secara sistematis demi terwujudnya pelayanan yang adil, transparan sesuai prosedur yang berlaku di FISIP UNPI Manado.

d). Tanggungjawab Sosial

Sebagai bentuk tanggungjawab sosial, maka setiap kebijakan akademik selalu diarahkan untuk dapat menciptakan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, beretika dan memiliki integritas sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang turut berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah maupun nasional.

5. Adil

Tata pamong FISIP UNPI Manado diterapkan dengan mengutamakan prinsip keadilan yakni dengan pola pemberian hak, kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh sivitas akademika tanpa diskriminasi dalam setiap proses akademik dan pengambilan keputusan di tingkat Program Studi dan Fakultas. Dalam aspek sumber daya manusia, proses rekrutmen dosen, tenaga kependidikan dan penugasan struktural dilakukan secara terbuka didasarkan pada kompetensi, integritas, bukan pada kedekatan personal ataupun karena kepentingan kelompok tertentu. Dalam jenjang karir akademik, dosen diberikan kesempatan yang sama.

Selain itu dalam aspek implementasi akademik, mahasiswa mendapatkan pelayanan secara akademik tanpa membedakan latar belakang sosial, agama maupun gender. Penilaian hasil belajar

mahasiswa juga dilakukan oleh dosen secara objektif, transparan dan sesuai dengan standar akademik.

Selanjutnya dalam aspek pengambilan keputusan, semua sivitas akademika memperoleh ruang menyampaikan pendapat/aspirasi melalui ruang dalam forum-forum fakultas, program studi dan senat fakultas dalam mekanisme konsultasi. Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah namun tetap menjamin keterwakilan dan keadilan bagi semua unsure sivitas akademika. Penerapan prinsip adil dalam tata paming FISIP UNPI Manado mampu menciptakan iklim akademik secara inklusif, harmonis dan tetap demokratis sehingga dapat mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan fakultas, terutama dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang diterapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado dijalankan secara kolektif dan demokratis yang berorientasi pada pengembangan mutu akademik. Dekan sebagai pimpinan di tingkat fakultas memiliki peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan, mengkoordinasikan tridharma perguruan tinggi, serta mengelola sumber daya yang tersedia di fakultas sehingga selaras dengan visi, misi dan tujuan fakultas serta universitas.

Pola kepemimpinan yang dijalankan dengan mengoperasionalkan semua kebijakan serta keputusan yang terkait dengan manajemen Fakultas, dimana semua sivitas akademika di lingkup FISIP UNPI Manado diberi peranyang sama untuk berkontribusi positif dalam memajukan kualitas Fakultas bahkan program studi. Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas organisasi, FISIP UNPI Manado memberi hak otonomi kepada

program studi ilmu politik dan unit kerja dibawah program studi untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas bahkan universitas.

Semua program kerja yang dijalankan oleh program studi dan unit kerja dimonitor oleh ketua program studi dengan berkoordinasi dengan kepala unit kerja yang ada di lingkup program studi. Ini dilakukan sebagai usaha dalam mewujudkan kinerja yang baik sesuai prinsip-prinsip *good university governance*. Selain itu juga, untuk hal-hal tertentu Ketua Program Studi Ilmu Politik juga melakukan konsultasi kepada Dekan dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu (bersifat tidak rutin) seperti dalam memutuskan pelaksanaan kegiatan akademik seperti kuliah umum, seminar atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Hal ini dipandang perlu dilakukan sehingga dalam implementasinya tetap memiliki kesesuaian dengan tercapainya visi, misi Fakultas.

Dalam aktivitas manajerial, pimpinan Fakultas juga menjalankan kepemimpinan publik dalam hal ini terkait dengan keharusan untuk mulai menjalin kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah daerah atau elemen masyarakat yang memiliki relevansi dengan bidang sosial dan politik masyarakat.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good university governance* dalam mengakomodir semua program kerja semester maka Dekan mewajibkan kepada program studi dan unit kerja yang ada untuk mengajukan program-program kerja semester untuk dibahas dalam rapat kerja. Tujuannya adalah agar setiap rencana kerja dibawah (program studi) sehingga dapat mewujudkan visi, misi serta tujuan Fakultas secara komprehensif. Dalam proses pembahasan rencana (*draft*) program kerja yang diusulkan tersebut, dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan mampu mengakomodir kepentingan seluruh sivitas akademika di lingkungan Fakultas yang juga selaras dengan program kerja universitas sehingga

memberi dampak terhadap pembangunan daerah secara lebih luas. Selanjutnya, semua rancangan program kerja yang telah disepakati dalam Rapat Kerja yang dimuat dalam Rencana Strategis Fakultas akan diimplementasikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sivitas akademika untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja fakultas.

c. Sistem Pengelolaan Penjaminan Mutu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado telah berkomitmnwn untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan akuntabel melalui sistem penjaminan mutu internal yang berintegritas. Sistem penjaminan mutu ini disusun berdasarkan kebijakan universitas serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mencakup bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

a. Kebijakan Penjaminan Mutu

Dalam mekanisme kebijakan penjaminan mutu dimulai dengan sosialisasi kebijakan penjaminan mutu oleh Tim Penjaminan Mutu Universitas dimana tim tersebut memberikan penjelasan dan pelatihan kepada para pimpinan Fakultas, Program Studi serta perwakilan dosen untuk menginformasikan mengenai manfaat dan seberapa penting proses penjaminan mutu Fakultas ini harus dijalankan. Selanjutnya kegiatan sosialisasi ini ditindak lanjuti dengan pembentukan Gugus Kendali Mutu tingkat fakultas melalui Surat Keputusan Dekan.

Pengelolaan penjaminan mutu internal FISIP UNPI Manado dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan dengan pendekatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,

Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP). Dalam implementasinya, Program Studi Ilmu Politik wajib menetapkan standar mutu akademik dan non akademik yang selaras dengan visi, misi dan tujuan fakultas.

Dalam memastikan keterlaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi, maka tugas tersebut dilakukan oleh GKM kemudian hasilnya diteruskan ke Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) tingkat universitas. Gugus Kendali Mutu maupun LPMI memiliki tugas pokok dan fungsi utama yaitu untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dosen, kualitas proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh GKM dan LPMI dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor dengan berkoordinasi dengan Dekan dan Ketua Program Studi.

Proses evaluasi mutu fakultas berfokus pada 3 (tiga) hal utama yaitu:

- 1) Kualitas pembelajaran, melalui penilaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata kuliah, evaluasi kinerja dosen, serta kepuasan mahasiswa.
- 2) Kinerja penelitian dan publikasi, dengan mengukur jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, keterlibatan dosen dengan mahasiswa, serta kolaborasi.
- 3) Kinerja pengabdian kepada masyarakat, dilakukan dengan monitoring kegiatan dosen dan mahasiswa dalam mendukung pembangunan di bidang sosial, politik dan pemerintahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil evaluasi mutu dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas dosen melalui pertemuan-pertemuan

ilmiah serta penguatan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah daerah ataupun lembaga mitra yang lain.

Dengan demikian sistem pengelolaan penjaminan mutu FISIP UNPI Manado tidak hanya menjadi instrumen monitoring dan evaluasi saja tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk transformasi kelembagaan untuk mewujudkan fakultas yang unggul, adaptif dan berdaya saing di tingkat daerah maupun nasional.

b. Organisasi Penjaminan Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) universitas memegang amanat penuh dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu internal didukung oleh GKM di tingkat fakultas. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) beranggotakan dosen yang termasuk dalam GKM di tingkat fakultas. Adapun tugas pokok sesuai dengan Statuta dan OTK UNPI Manado yaitu melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, proses dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam menjalankan tugas tersebut, LPMI memiliki fungsi antara lain :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Internal;
- 2) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- 3) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- 4) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- 6) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan;
- 7) Pelaksanaan menyiapkan bahan kerja sama di bidang

pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;

- 8) Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan; dan
- 9) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal UNPI Manado.

Dalam skala fakultas dan program studi, LPMI berkoordinasi dengan GKM fakultas termasuk program studi dalam hal-hal berikut :

- 1) Penyusunan Kebijakan Akademik Fakultas, Standar Akademik Fakultas, Manual Mutu Akademik Fakultas, Manual Prosedur Fakultas dan Instruksi Kerja FISIP dan Program Studi Ilmu Politik;
- 2) Penyusunan Standar Mutu Akademik Fakultas;
- 3) Perumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi Program Studi Ilmu Politik serta dilakukan evaluasi diri;
- 4) Pelaksanaan Sistem Audit dan Audit Kepatuhan secara rutin per semester;
- 5) Penyampaian Laporan Hasil Audit serta rekomendasi tertulis kepada pimpinan fakultas dan program studi untuk perbaikan dan pengembangan;
- 6) Mengevaluasi serta menganalisis tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang telah disetujui pimpinan fakultas dna program studi.

c. Sistem Dokumen Penjaminan Mutu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado telah memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu internal dengan berpedoman pada dokumen Kebijakan Mutu Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Pedoman Lembaga Penjaminan Mutu Internal Manado. Sistem tersebut diwujudkan melalui penyusunan dokumen penjaminan

mutu yang berfungsi sebagai pedoman bagi fakultas dan program studi dilingkup UNPI Manado.

d. Audit

Salah satu unsur penting dalam sistem penjaminan mutu internal adalah Audit mutu. Mutu FISIP UNPI Manado selama ini sudah berjalan berupa evaluasi yang dilakukan melalui menyebarkan angket/kuisisioner yang ditujukan kepada mahasiswa peserta kuliah pada pertengahan dan akhir semester berjalan. Kuisisioner diedarkan untuk menilai keberhasilan dosen dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah yang diampu setiap semesternya. Sedangkan untuk mengaudit terhadap penjaminan mutu tata kelola Program Studi dan Laboratorium dilakukan dengan menyusun dokumen evaluasi diri oleh pengelola Program Studi dan unit pengelola Laboratorium Ilmu Politik.

Mekanisme audit penjaminan mutu dilaksanakan mulai ketika Tim dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berkolaborasi dengan GKM turun ke Program Studi Ilmu Politik setiap semester dan akhir tahun akademik, untuk memonitoring serta mengevaluasi kinerja Prodi dan laboratorium sehingga dapat dilakukan penilaian. Evaluasi dilakukan untuk melihat kualitas Program Studi Ilmu Politik dan Laboratorium dalam tridharma perguruan tinggi yakni bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan penilaian aspek-aspek lain sebagai sumber daya pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu aset, sarana dan prasarana, keuangan, dan manajemen.

Dokumen standar mutu yang mendasari kegiatan penjaminan mutu fakultas dan program studi serta audit mutu ini mengikuti standar mutu yang dimiliki oleh UNPI Manado. Mekanisme penjaminan mutu di bawah koordinasi LPMI UNPI Manado, menjadi bahan perbaikan performa

kinerja tata kelola fakultas, program studi dan unit kerja dibawahnya menjadi lebih baik.

1.2.3 Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

a. Kurikulum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan susunan kurikulum Program Studi Ilmu Politik agar selaras dengan visi dan misi serta arah tujuan FISIP UNPI Manado dan Universitas. Disamping itu, kurikulum yang disajikan oleh Program Studi juga harus dijamin bahwan memiliki relevansi keilmuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi *stakeholders* sehingga dapat menmbentuk mahasiswa seta menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan keilmuan yang mereka peroleh dalam perkuliahan, mereka berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado berupaya total dalam mendukung proses implementasi tridharma serta teknis manajemen dengan memfasilitasi semua tahapan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Semenara itu, secara substansi maupun teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Politik menjadi tugas dan wewenang penuh Program Studi namun tetap didasarkan pada visi, misi, serta tujuan FISIP UNPI Manado.

Dalam implementasinya, FISIP UNPI Manado telah menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), meskipun masih terdapat kekurangan untuk penyempurnaan. Kurikulum yang ada dirancang sebagai upaya untuk mencapai profil lulusan agar berkompetensi dan berdaya saing, dengan kompetensi utama dala bidang ilmu sosia, politik dan pemerintahan.

Adapun struktur kurikulum yang disajikan sudah mencakup mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah wajib program studi, serta muatan lokal sesuai kebutuhan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

b. Pembelajaran

Proses pembelajaran yang diselenggarakan FISIP UNPI Manado dan Program Studi Ilmu Politik dilaksanakan secara tatap muka langsung (konvensional). Namun sejak bulan Maret 2020, terdapat adaptasi besar-besaran karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang berakibat pada perubahan metode dan proses perkuliahan beralih ke pembelajaran daring (*online learning*) dengan menggunakan beberapa platform yaitu: *Google Meet, Whatsapp Group, dan Zoom Meeting*. Perubahan tersebut memaksa para dosen untuk melakukan penyesuaian dalam menerapkan metode pembelajaran, sehingga lebih banyak menggunakan penugasan individu yang dan kelompok, diskusi virtual dan presentasi online.

Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mekanisme kombinasi antara tes tertulis dengan presentasi baik secara daring maupun tatap muka langsung yang bersifat terbatas/terjadwal.

Meskipun demikian, dalam prosesnya terdapat tantangan besar yang dialami dosen dan mahasiswa termasuk pimpinan fakultas dan program studi, yaitu keterbatasan infrastruktur digital atau jaringan internet yang cukup bervariasi. Hal tersebut membuat fakultas dan program studi memberikan kebijakan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran.

c. Suasana Akademik

Suasana akademik yang tercipta ditandai dengan upaya-upaya dari fakultas dan program studi dalam menjaga interaksi ilmiah antara

dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa meskipun sebagian besar aktivitas akademik berlangsung secara daring.

Fakultas dan program studi tetap mendorong agar seluruh kegiatan akademik seperti seminar, workshop, kuliah umum dan forum akademik lainnya tetap diikuti oleh dosen dan mahasiswa. Sedangkan dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan karena harus mematuhi protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah daerah. Mahasiswa tetap dilibatkan dalam aktivitas kemahasiswaan, meskipun dalam format kegiatan secara online (daring).

Secara umum, walaupun Pandemi menghadirkan budaya baru yang penuh keterbatasan, namun suasana akademik FISIP UNPI Manado dan program studi ilmu politik tetap diupayakan untuk berjalan kondusif dengan menekankan pada fleksibilitas, adaptasi teknologi dalam semangat kebersamaan.

1.2.4 Mahasiswa dan Lulusan

Pandemi Covid-19 memberi dampak perubahan signifikan terhadap perolehan jumlah mahasiswa dan lulusan

a. Mahasiswa

Data mahasiswa reguler Program Studi Ilmu Politik tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Mahasiswa pada TS Terakhir

No	Nama Program Studi	Reguler	Transfer
1	Ilmu Politik	15	-
Jumlah		15	-

Berdasarkan jumlah mahasiswa tersebut, menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah secara signifikan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Hasil penelusuran data mahasiswa tahun 2020, ditemukan

berasal dari latar belakang yang cukup beragam, sebagian besar berasal dari Sulawesi Utara, sebagian kecil dari provinsi Maluku Utara dan Papua. Aktivitas kemahasiswaan tetap berjalan meskipun dialihkan secara online (daring). Perolehan hasil pembelajaran mahasiswa masih cenderung stabil.

b. Lulusan

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado mengacu pada profil kompetensi lulusan di bidang sosial, politik dan pemerintahan. Masa tunggu lulusan sampai mereka memperoleh pekerjaan relatif bervariasi antara 6-12 bulan. Meskipun demikian, sebagian besar alumni mampu terserap oleh penyedia kerja di beragam sektor baik instansi/lembaga pemerintah maupun swasta.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNPI Manado juga membangun relasi komunikasi dan informasi dengan alumni meskipun belum terorganisir dengan maksimal.

1.2.5 Sumber Daya Manusia

a. Dosen

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado didukung oleh dosen dan tenaga pendidikan yang cukup. Sampai saat ini, FISIP UNPI Manado memiliki 9 (sembilan) orang dosen tetap Program Studi yang aktif dengan kualifikasi pendidikan seluruhnya magister (S2), dan sebagian besar memiliki jabatan akademik (Asisten Ahli), 1 (satu) orang dosen Lektor dan sedang melanjutkan studi lanjut Doktor (S3).

Aktivitas tridharma yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan akibat Pandemi Covid-19.

c. Tenaga Kependidikan

Fakultas memiliki sumberdaya pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni tenaga kependidikan yang bertugas dalam administrasi akademik dan layanan umum fakultas sekaligus program studi. Meskipun dari segi jumlah tenaga kependidikan masih terbatas, tetapi memiliki kontribusi positif dan mendukung kelancaran administrasi fakultas termasuk juga dalam transisi sistem pelayanan yang dahulunya luring menjadi daring selama pandemi. Dari segi kompetensi tenaga kependidikan, masih terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembimbingan internal universitas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar tetap sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dalam memberikan layanan akademik.

1.2.6. Sarana Prasarana

a. Gedung dan Ruang Kelas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado telah memiliki sarana dan prasarana dasar yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi meskipun masih terdapat keterbatasan yang perlu ditingkatkan dimasa mendatang. Fakultas menempati gedung permanen milik universitas dengan kondisi fisik bangunan permanen dan cukup. Tersedia ruang kelas, dengan kapasitas kurang lebih 20-30 orang mahasiswa, dilengkapi papan tulis, kursi mahasiswa, meja dan kursi untuk dosen, kipas angin sederhana. Sejak pandemik, ruang kelas jarang digunakan secara penuh karena sebagian perkuliahan dilakukans ecaru daring.

b. Ruang Kerja dan Fasilitas Akademik

Pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan memiliki ruang kerja yang digunakan bersama untuk kegiatan akademik, konsultasi akademik, diskusi dosen program studi, dan aktivitas akademik dan umum lainnya.

Fakultas juga memanfaatkan laboratorium ilmu politik meskipun dengan fasilitas yang masih terbatas, juga laboratorium komputer yang digunakan bersama dengan fakultas yang lainnya meskipun jumlahnya masih terbatas.

c. Perpustakaan dan Akses Referensi

Mahasiswa dan dosen dapat mengakses koleksi literatur melalui perpustakaan universitas yang menyediakan buku teks. Sejak tahun 2020, universitas mulai melakukan pengembangan akses referensi digital untuk mendukung pembelajaran daring meskipun masih terbatas pada sumber online gratisan.

d. Sistem Informasi

Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah melakukan adaptasi dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan didukung oleh unit layanan teknologi informasi yang cukup memadai yakni Pusat Teknologi Informasi (PTI) yang berkedudukan di tingkat universitas. Unit kerja tersebut mengelola dan mengembangkan website universitas (<https://unpi.ac.id>) yang didalamnya fakultas dan program studi. Websiter tersebut menjadi wadah komunikasi dan informasi kepada masyarakat umum yang mudah diakses kapan saja untuk mengetahui informasi tentang universitas, fakultas dan program studi.

Sementara itu dalam sistem informasi akademik, UNPI Manado sudah menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang mudah diakses dengan mudah oleh seluruh warga kampus melalui <https://sikad.unpi.ac.id>. Penggunaan SIKAD ini diterapkan dengan pengaturan tingkat pengguna yaitu bagi dosen, mahasiswa, Ketua Program Studi. Beberapa prosedur dan mekanisme akademik yang

dilakukan melalui SIAKAD yaitu menginput jadwal perkuliahan, pengisian kontrakKartu Rencana Studi (KRS), menginput nilai, melihat Kartu Hasil Studi (KHS) serta mencetak Transkrip Nilai melalui komputer maupun smartphone yang terhubung secara intranet. Melalui SIAKAD, monitoring penilaian oleh dosen kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh program studi dengan mudah, dan riil time.

e. Sarana Penunjang lainnya

Fasilitas umum yang masih mengandalkan fasilitas bersama di tingkat universitas sebagai sarana penunjang yang ada seperti musolah, area parkir, ruang aula, ruang tunggu dosen dan mahasiswa, toilet yang bersih, koneksi internet yang cukup, ruang siding, ruang rapat dan ruang kegiatan mahasiswa.

1.2.7. Sumber Pendanaan

Secara umum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado memperoleh dukungan pendanaan utama dari universitas yang bersumber dari biaya pendidikan mahasiswa yang terdiri dari SPP, Registrasi kembali, dan SKS serta kontribusi pendapatan lain universitas. Pendanaan yang diperoleh tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi termasuk operasional di fakultas dan program studi.

Alokasi dana fakultas masih bersifat sentralistik, dimana pengelolaan anggaran dilakukan oleh universitas kemudian didistribusikan ke fakultas dan program studi berdasarkan usulan program kerja dan pembiayaannya yang diajukan. Dana tersebut dialokasikan untuk:

- 1) Operasional rutin fakultas dan program studi
- 2) Kegiatan pembelajaran
- 3) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen

- 4) Dukungan kegiatan kemahasiswaan
- 5) Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana

Sebagai akibat pandemi tahun 2020, maka alokasi anggaran banyak digunakan untuk penyediaan dana kuota bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan, penyediaan peralatan yang mendukung IT, serta pelatihan dosen dalam menggunakan platform yang membantu pelaksanaan pembelajaran secara daring.

1.2.8. Akreditasi

Status atau predikat akreditasi program studi memang merupakan faktor utama yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi program studi yang menunjang performa fakultas. Capaian akreditasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Politik tahun 2019 berpredikat C. Hal ini menjadi dorongan fakultas dan program studi untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma kedepan akan lebih meningkat.

1.2.9. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih minim. Namun Fakultas sudah berupaya mendorong kontribusi aktif dari dosen dan mahasiswa, dalam kondisi pendanaan yang masih terbatas ditengah pandemi. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FISIP UNPI Manado difokuskan pada isu-isu sosial dan politik. Dalam prakteknya, penelitian masih lebih banyak dilakukan oleh dosen dan mahasiswa studi akhir, dimana dosen menjadi pembimbing. Sementara itu, dalam pengabdian kepada masyarakat, lebih banyak dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan oleh dosen secara berkelompok maupun dosen berkolaborasi dengan mahasiswa.

Kedepan fakultas berupaya untuk mendorong jumlah penelitian

dan pengabdian masyarakat lebih meningkat melalui pelibatan dosen dalam pertemuan ilmiah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan pengabdian.

1.3. Permasalahan dan Tantangan

Pendidikan dan/atau pengajaran menjadi poin penting dari dalam Tridharma Perguruan Tinggi, selain riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan amanat konstitusi nasional bahwa negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap warga negara berhak memperoleh akses dan kualitas yang baik dari penyelenggaraan pendidikan.

Secara umum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah berkontribusi positif menjalankan tugas dan fungsi negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan. Terbukti bahwa beberapa generasi bangsadari wilayah perbatasan mengenyam pendidikan di Universitas Pembangunan Indoensia Manado khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga fakultas telah berkontribusi juga ikut mendukung terwujudnya tujuan nasional tersebut.

Keberadaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang hanya memiliki satu program studi (Program Studi Politik) harus diakui masih menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengembangan fakultas, apalagi dengan status akreditasi yang ada. Terkait dengan dokumen mutu dan dokumen akademik masih perlu peningkatan, apalagi dengan penerapan kurikulum yang baru, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik masih bersifat fluktuatif, namun sifatnya belum merata pada semua dosen. Sehingga dipandang perlu adanya sinkronisasi dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Demikian juga dalam bentuk publikasi hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal nasional memang perlu peningkatan. Selain itu juga perlu untuk mewujudkan dan meningkatkan jurnal-jurnal pada Program Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada indeksasi Sinta. Peningkatan publikasi ini merupakan syarat utama dalam mencapai peningkatan standar akreditasi agar dapat bersaing dengan universitas lain. Dalam pencapaian kuantitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai *out put* penelitian juga masih kurang, oleh karena itu fakultas harus berupayan untuk mulai menghasilkan hak paten tersebut.

Seiring perubahan zaman khususnya di masa pandemik, terjadi perubahan dalam tatanan kehidupan manusia dalam semua aspek termasuk juga dalam kehidupan kampus juga mengalami perubahan. Salah satu perubahan tatanan kehidupan kampus yang paling mencolok yakni dengan adanya kebijakan baru di dunia perguruan tinggi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni dengan pemberlakuan sistem pembelajaran menggunakan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dimana dengan sistem ini mahasiswa diharuskan mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus dengan beban kuliah maksimal 20 SKS.

Perubahan tersebut menuntut fakultas dan program studi untuk dapat mewujudkan pelayanan akademik dengan baik.

Meskipun demikian, FISIP UNPI yang di dalamnya Program Studi Ilmu Politik masih perlu melakukan optimalisasi di semua bidang layanan kampus mulai dari manajemen, transparansi, pengorganisasian, responsivitas, ketertiban administrasi umum, transparansi pengelolaan keuangan, sistem birokrasi dan pemanfaatan aset.

Secara umum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah menjalankan organisasi tata kelola manajemen sudah cukup menunjukkan perbaikan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dukungan sistem informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kepada seluruh sivitas akademika UNPI Manado. Namun demikian, dalam menyikapi adanya penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang baru mulai diterapkan tahun 2020 ini pasti menjadi tantangan besar bagi fakultas terutama prodi dalam menyesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada. Disamping itu juga, karena kebijakannya sangat baru untuk diterapkan, maka pasti akan terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh sivitas akademika FISIP UNPI termasuk Program studi ilmu politik, dan perlu juga dukungan dari *stakeholders*.

1.4. Analisis SWOT

Dalam menyusun dan menetapkan rencana strategis untuk 5 tahun kedepan sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan, FISIP UNPI Manado perlu melakukan analisis SWOT (kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan (eksternal) yang

dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Analisis SWOT

Internal		Eksternal	
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
1. FISIP UNPI Manado menempati lokasi yang strategis karena berada dekat dengan pusat Kota Manado 2. FISIP UNPI Manado sudah memiliki tempat kuliah milik sendiri bukan sewa yang terintegrasi dengan universitas dan fakultas-fakultas dibawah naungan UNPI Manado 3. FISIP UNPI Manado sudah dikenal oleh masyarakat luas sehingga memudahkan untuk melakukan sosialisasi dan promosi 4. Mahasiswa	1. Jumlah dosen berpendidikan strata tiga masih minim 2. Jumlah dosen tersertifikasi masih minim 3. Jumlah dosen Lektor dan Lektor Kepala masih minim 4. Jumlah mahasiswa menurun akibat pandemi covid-19 5. Kuantitas publikasi hasil penelitian dan PKM dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi masih minim 6. Pemahaman civitas akademika FISIP UNPI terhadap penggunaan sistem informasi dan	1. Alumni FISIP UNPI Manado dapat bekerja di instansi/lembaga pemerintah maupun sektor swasta 2. Kesempatan untuk terlibat dalam kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 3. Memiliki kerjasama mitradengan instansi pemerintah maupun swasta dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi 4. Memiliki kesempatan implementasi MBKM 5. Jumlah	1. Tingginya persaingan dengan prodi ilmu politik di PT lain yang bereputasi baik sekali di SULUT 2. Pilihan bidang ilmu-ilmu sosial cukup beragam bagi lulusan SMA yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang PT 3. Menurunnya sumber-sumber pendapatan universitas sebagai dampak dari menurunnya jumlah mahasiswa yang masuk akibat pandemi covid-19 4. Belum tersedianya sumber-sumber keuangan lainnya yang

berasal dari berbagai daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Timur 5. Mahasiswa memiliki kemampuan dan motivasi yang besar untuk mengikuti pembelajaran 6. Semua dosen berpendidikan terakhir strata dua dan sebagian besar memiliki jabatan akademik 7. Bidang keilmuan masih relevan dengan zaman 8. FISIP UNPI Manado sudah menjalin beberapa kerjasama dengan instansi/ lembaga pemerintah daerah 9. FISIP UNPI Manado menawarkan kurikulum berbasis potensi dan kearifan lokal yang	teknologi masih minim 7. Sumber-sumber keuangan atau pendanaan yang masih minim 8. Kemitraan atau sistem jejaring masih perlu dikembangkan	masyarakat peminat program pendidikan strata satu makin meningkat 6. Tingginya permintaan untuk berkolaborasi dan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal dalam mendukung MBKM 7. Meningkatnya permintaan terhadap lulusan strata satu di dunia kerja	mendukung sumber pendapatan yang sudah ada saat ini 5. Perlu adaptasi regulasi ditengah keterbatasan berbagai sumberdaya 6. Menurunnya pendapatan masyarakat sebagai efek pandemi covid-19 7. Perubahan tuntutan dunia kerja dan industri terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dari segi keterampilan serta produktivitas kerja
--	---	--	--

membedakannya dengan prodi yang sama di PT lain 10. Memiliki jaringan internat yang memadai			
---	--	--	--

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado sebagai salah satu lembaga pendidikan turut bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang berkompeten dan unggul dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Pandemi sebagai pendorong dunia memasuki era disrupsi ini melahirkan Revolusi Industri 4.0 dunia, yaitu situasi zaman yang bepusat pada penyesuaian-penyesuaian semua aspek hidup manusia dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi berkembang sangat cepat member dampak agar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado harus memberi respon yang serius agar dapat menyeimbangi perubahan zaman untuk kemajuan fakultas dan program studi yang bernaung dibawahnya. Adapun Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado tahun adalah:

“Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul dan berdaya saing lokal dan nasional berbasis pada potensi dan kearifan lokal pada tahun 2025”

2.2. Misi

Dalam upaya mencapai visi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado tersebut, maka perlu adanya misi yang mendukung, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berintegritas moral yang baik guna menghasilkan lulusan sarjana yang unggul, kompeten dan berdaya saing di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis pada potensi dan kearifan lokal;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan mengembangkannya secara inovatif dalam bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kompetensi dan mutu sumberdaya manusia yang unggul dalam pelayanan akademik yang profesional di bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal berdaya saing lokal dan nasional;
- 5) Melakukan reformasi birokrasi dalam tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan transparansi, kapabilitas, akuntabilitas, efisien dan efektif, sehingga unggul dan berdaya saing;
- 6) Membangun relasi sinergis dengan *stakeholders* di tingkat lokal dan nasional dalam pengembangan bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal.

2.3 Tujuan

Dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan program Studi Ilmu Politik menetapkan tujuan sebagai arah dalam menentukan strategi yang akan digunakan demi pencapaian visi dan misi, yakni sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten dan berdaya saing di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis pada potensi dan kearifan lokal;
- 2) Menghasilkan penelitian dan publikasi yang inovatif dalam bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman;
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- 4) Menghasilkan kompetensi dan mutu sumberdaya manusia yang unggul berdaya saing lokal dan nasional dalam pelayanan akademik yang professional di bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal;
- 5) Menghasilkan reformasi birokrasi dalam tata kelola kelembagaan yang transparansi, kapabilitas, akuntabilitas, efisien, efektif, unggul dan berdaya saing;
- 6) Menghasilkan relasi sinergis dengan *stakeholders* di tingkat lokal dan nasional dalam pengembangan bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal.

2.3. Sasaran

Adapun sasaran yang ditargetkan FISIP UNPI Manado adalah:

- 1) Tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran unggul, kompeten dan berdaya saing di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis pada potensi dan kearifan lokal;
- 2) Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengembangan penelitian dan publikasi yang inovatif dalam

bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman;

- 3) Tercapainya peningkatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- 4) Tercapainya peningkatan kompetensi dan mutu sumberdaya manusia yang unggul berdaya saing lokal dan nasional dalam pelayanan akademik yang profesional di bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal;
- 5) Tercapainya peningkatan reformasi birokrasi dalam tata kelola kelembagaan yang transparansi, kapabilitas, akuntabilitas, efisien, efektif, unggul dan berdaya saing;
- 6) Tercapainya peningkatan relasi sinergis dengan stakeholders di tingkat lokal dan nasional dalam pengembangan bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal.

2.4. Sasaran dan Strategi Pencapaian

Berdasarkan kondisi saat ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik bab sebelumnya, tentunya masih perlu banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan FISIP UNPI Manado kedepan. Sehingga ditetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 dalam tabel berikut:

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka FISIP UNPI Manado menetapkan strategi pencapaiannya, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran unggul, kompeten dan berdaya saing di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu

sosial dan politik berbasis pada potensi dan kearifan lokal;

- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengembangan penelitian dan publikasi yang inovatif dalam bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman;
- 3) Peningkatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- 4) Peningkatan kompetensi dan mutu sumberdaya manusia yang unggul berdaya saing lokal dan nasional dalam pelayanan akademik yang professional di bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal;
- 5) Peningkatan reformasi birokrasi dalam tata kelola kelembagaan yang transparansi, kapabilitas, akuntabilitas, efisien, efektif, unggul dan berdaya saing;
- 6) Peningkatan relasi sinergis dengan *stakeholders* di tingkat lokal dan nasional dalam pengembangan bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal.

BAB III

ARAH KEIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN FAKULTAS

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Arah keijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado tahun 2020-2024 mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas. Fokus dalam arah kenijakan fakultas diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada kualitas (mutu), daya saing serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan dunia kerja. Adapun arah kenijakan fakultas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan mutu akademik dan kurikulum

Melalui penguatan mutu akademik dan kurikulum yang relevan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Strateginya adalah:

- a) Mengembangkan suasana akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkualitas, unggul, kompeten dan berdaya saing di tingkat lokal dan nasional;
- b) Meningkatkan jumlah mata kuliah yang sesuai dengan visi, misionis dan tujuan fakultas serta potensi dan kearifan lokal Sulawesi utara yang tidak dimiliki program studi ilmu politik di PT lain.
- c) Menambah program studi baru S1 sambil memperbaharui secara terus menerus terhadap program studi yang sudah ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pembangunan daerah Sulawesi utara;
- d) Mendorong predikat akreditasi menuju peningkatan dari sebelumnya;

e) Meningkatkan akreditasi program studi.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian

Berorientasi pada isu-isu sosial politik dalam pembangunan daerah. Strateginya adalah:

- a) Meningkatkan kuantitas penelitian yang dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan di publikasikan pada jurnal terakreditasi;
- b) Meningkatkan mutu penelitian penelitian agar selaras dengan potensi dan kearifan lokal Sulawesi utara;
- c) Meningkatkan sitasi publikasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa;
- d) Membangun pusat studi isu-isu strategis dalam kajian ilmu sosial dan politik daerah.
- e) Meningkatkan jumlah dan bentuk PKM sebagai upaya menyebarluaskan hasil karya dosen dan/atau mahasiswa FISIP, terutama yang terkait dengan temuan tepat guna untuk membantu pemecahan masalah yang ada di masyarakat.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan politik

Berbasis hasil riset terhadap potensi dan kearifan lokal yang ada di daerah. Strateginya adalah:

- a) Mengembangkan implementasi PKM secara konsisten agar pelaksanaan kegiatan PKM memberi manfaat untuk pengembangan IPTEK lebih luas;
- b) Meningkatkan dan mengembangkan jumlah implementasi kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah daerah

yang sudah ada bagi dosen dan/atau mahasiswa, dalam bentuk Program yang selaras dengan MBKM yaitu Magang Mahasiswa, Bakti Sosial, Kuliah Kerja Nyata, pemberdayaan masyarakat, Praktek Kerja Lapangan, Proyek di Desa, Mengajar di Sekolah, Pertukaran Pelajar, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independent atau Proyek Kemanusiaan.

4. Peningkatan kompetensi dan mutu dosen dan tenaga kependidikan.

Berorientasi pada peningkatan pelayanan akademik yang profesionalisme dan produktivitas akademik. Strateginya adalah:

- a) Meningkatkan kualifikasi dosen ke jenjang S3 dan jabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala;
- b) Mendorong sertifikasi dosen professional (Serdos)
- c) Mendorong dosen dan tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pelatihan demi peningkatan kompetensi sesuai bidang keahlian;
- d) Mendorong kinerja dosen dan tenaga kependidikan agar memberikan pelayanan berkualitas, profesional dan produktif.

5. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan

Berorientasi pada reformasi birokrasi dalam tata kelola kelembagaan yang transparansi, kapabilitas, akuntabilitas, efisien, efektif, unggul dan berdaya saing. Strateginya adalah:

- a) Mengoptimalkan system penjaminan mutu internal di tingkat fakultas dan program studi;
- b) Menerapkan sistem informasi manajemen fakultas dan program studi terintegrasi;
- c) Menciptakan iklim akademik yang inklusif, nyaman dan positif.

6. Peningkatan kerjasama dan jejaring dengan *stakeholders*

Berorientasi pada kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta.

Strateginya adalah:

- a) Memperluas jejaring kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta untuk pelaksanaan tridharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) Mengembangkan program magang dan praktikum;
- c) Menambah kegiatan promosi fakultas dan program studi kepada masyarakat luas.

7. Peningkatan sarana dan prasarana akademik

Berorientasi pada sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk menciptakan lingkungan kampus yang kondusif agar dapat meningkatkan kinerja dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Strateginya adalah:

- a) Meningkatkan kapasitas E-learning beserta infrastruktur pendukung lainnya;
- b) Meningkatkan kemampuan dosen serta tenaga kependidikan untuk memahami dan menggunakan E-learning kampus;
- c) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana fakultas yang mendukung suasana belajar bagi sivitas akademika FISIP UNPI Manado;
- d) Meningkatkan kapasitas layanan internet di lingkungan FISIP UNPI Manado.

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam implementasi Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPI Manado tahun 2020-2024, maka ditetapkan regulasi untuk menjadi dasar dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Indonesia di Manado dan Pemberian Status terdaftar pada 11 (sebelas) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Universitas Pembangunan Indonesia di Manado;
5. Statuta Universitas Pembangunan Indonesia Manado.

3.3. Kerangka Kelembagaan

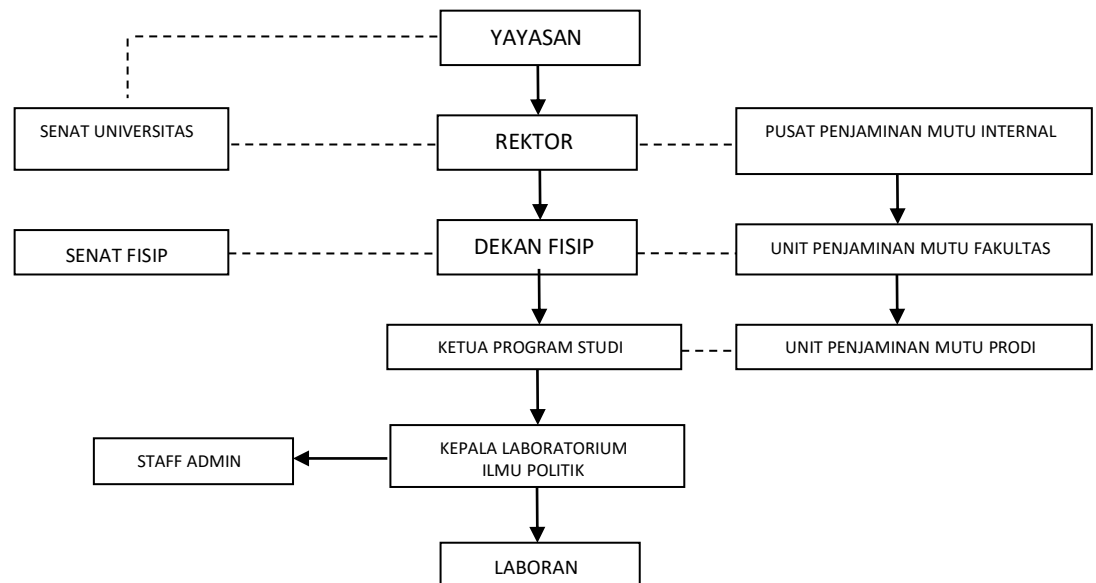
Kerangka kelembagaan tersebut tidak hanya mencakup struktur organisasi semata, tetapi juga terkait dengan tata laksana, yang efektif dan efisien sehingga sivitas akademika FISIP UNPI Manado mampu melaksanakan tugas dan fungsi fakultas dengan maksimal. Struktur organisasi yang tepat dan sejalan dapat mendukung tercapainya sasaran strategis fakultas yang sudah ditetapkan, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan tata laksana (proses) organisasi, serta dapat mencegah terjadinya tumpang tindih dalam tugas

dan fungsi masing-masing organ dalam organisasi fakultas.

Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas tentu memerlukan perencanaan program kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur lengkap dengan alur pelaksanaan. Dalam tahap implementasinya diharapkan dapat menghasilkan output maksimal serta dapat berdampak kepada *stakeholder* bahkan masyarakat luas sebagai pihak yang akan menerima lulusan FISIP UNPI Manado di dunia kerja.

Berpedoman pada Peraturan Pengurus Yayasan Generasi pembangunan Indonesia Nomor 010/SK/YGPI/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Struktur Organisasi Fakultas dapat dirinci pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas



Keterangan :

Garis Koordinasi -----

Garis Komando —————>

Struktur organisasi tersebut di atas adalah unsur-unsur utama pelaksana tugas dan fungsi di tingkat fakultas. Selain itu juga mendukung kinerja Dekan FISIP UNPI Manado dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, yaitu: menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan/pengajaran; penelitian; pengabdian kepada masyarakat), serta tugas dan fungsi manajerial yaitu: membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta hubungan kerja dengan lingkungan universitas.

3.4. Target Kinerja Fakultas Tahun 2020-2024

Dalam upaya mencapai sasaran strategis FISIP UNPI Manado, maka perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan serta target yang hendak dicapai secara periodic per tahun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran unggul, kompeten dan berdaya saing di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis pada potensi dan kearifan lokal					
	Presentase Program Studi terakreditasi Baik	-	-	-	-	1
	Jumlah mahasiswa berwirausaha	1	2	3	4	5
	Jumlah mahasiswa mengikuti program MBKM	1	2	2	2	2
	Jumlah mahasiswa berprestasi	1	2	3	4	5
	Presentase mahasiswa lulus tepat waktu	30%	35%	40%	45%	50%
	Presentase lulusan bersertifikat kompetensi	1%	1%	2%	2%	3%
	Presentase lulusan yang	20%	25%	30%	35%	40%

	langsung bekerja					
	Presentase mahasiswa penerima beasiswa	35%	35%	40%	45%	50%
	Rata-rata IPK Lulusan	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55
	Rasion dosen dengan mahasiswa	1:1,6	1:2,2	1:2,7	1:3,3	1:3,8
	Program Studi Baru	-	-	1	1	1
	Penggunaan E-Learning	75%	70%	65%	60%	50%
2	Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengembangan penelitian dan publikasi yang inovatif dalam bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman					
	Jumlah publikasi hasil penelitian ke jurnal nasional	3	3	4	4	5
	Jumlah HAKI yang terdaftar	2	2	3	4	5
	Jumlah Sitasi karya ilmiah	10	15	20	25	30
3	Tercapainya peningkatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan					
	Jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat ke jurnal nasional	5	10	15	20	25
	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dalam ilmu sosial dan politik dan sesuai kebutuhan masyarakat	5	10	15	20	25
	Jumlah publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat	-	3	3	5	10
	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat berkolaborasi dengan stakeholders	-	3	3	5	10
4	Tercapainya peningkatan kompetensi dan mutu sumberdaya manusia yang unggul berdaya saing lokal dan nasional dalam pelayanan akademik yang professional di bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal					
	Jumlah dosen S3 terhadap jumlah dosen	-	2	5	7	8
	Jumlah dosen Lektor	-	-	4	5	8

	Jumlah dosen Asisten Ahli	3	3	3	4	4
	Jumlah dosen sertifikasi	-	1	2	2	8
	Jumlah dosen yang sudah mengikuti AA Dan Pekerti	3	3	3	5	8
5	Tercapainya peningkatan reformasi birokrasi dalam tata kelola kelembagaan yang transparansi, kapabilitas, akuntabilitas, efisien, efektif, unggul dan berdaya saing					
	Akreditasi Institusi	B	B	B	B	A
	Presentase lulusan langsung bekerja	40%	45%	48%	50%	55%
6	Tercapainya peningkatan relasi sinergis dengan <i>stakeholders</i> di tingkat lokal dan nasional dalam pengembangan bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal					
	Kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah daerah	-	2	3	3	5
	Kerjasama lainnya	2	3	3	4	4

3.5. Kerangka Pendanaan

Perencanaan pendanaan ini ditujukan agar dapat diperhitungkan kebutuhan dana organisasi fakultas untuk mencapai sasaran strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahunan berdasarkan program dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Dalam melakukan penyusunan anggaran atau pendanaan fakultas tetap memperhatikan sumber dan ketersediaan dana diperoleh fakultas selama 5 (lima) tahun, yang dirinci pada table berikut:

Tabel 4. Perhitungan Pendanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Program dalam peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran unggul, kompeten dan berdaya saing	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000

di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis pada potensi dan kearifan lokal					
Program dalam peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengembangan penelitian dan publikasi yang inovatif dalam bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman	25.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000
Program dalam peningkatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan	25.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000
Program dalam peningkatan kompetensi dan mutu sumberdaya manusia yang unggul berdaya saing lokal dan nasional dalam pelayanan akademik yang professional di	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000

bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal					
Program dalam peningkatan reformasi birokrasi dalam tata kelola kelembagaan yang transparansi, kapabilitas, akuntabilitas, efisien, efektif, unggul dan berdaya saing	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000
Program dalam peningkatan relasi sinergis dengan stakeholders di tingkat lokal dan nasional dalam pengembangan bidang ilmu sosial dan politik berbasis potensi dan kearifan lokal	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado tahun 2020-2024 ini merupakan peta jalan **(roadmap)** fakultas selama satu periode kepemimpinan. Secara operasional, renstra ini akan direalisasikan melalui program kerja tahunan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dilingkup UNPI Manado.

Renstra ini juga adalah dasar bagi penyusunan rencana kerja program studi dan unit kerja lainnya dibawah naungan FISIP UNPI Manado. Apabila terjadi perubahan dilingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pengimplementasian Renstra yang ditetapkan ini, maka dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadapnya oleh pimpinan fakultas dengan meminta pertimbangan Senat fakultas dan Rektor selaku pimpinan tertinggi universitas. Diharapkan agar renstra ini dapat mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas.

Diucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam proses renstra ini. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Amiin.

Manado, 02 Juli 2020

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik



Ratnasari Paraisu, S.iP.,M.Si